

A photograph showing a dirt road under construction in a rural area. Several workers are visible, some using tools to level the ground. The background features lush green trees and a utility pole.

PEMBANGUNAN PEDESAAAN

Prinsip, Kebijakan dan Manajemen

**Feliks Arfid Guampe, Umar, Ade Putra Ode Amane,
Muhammad Nur, Ardhana Januar Mahardhanir,**

**Fachrul Husain Habibie, Andi Hartata, Dina Limbong Pamuttu,
Amruddin, Muh. Akbar, James Sinurat, Dasep Dodi Hidayah,
Dewi Sriastuti Nababan, Zainal Abidin**



PEMBANGUNAN PEDESAAN

Prinsip, Kebijakan dan Manajemen

**Feliks Arfid Guampe, Umar, Ade Putra Ode Amane,
Muhammad Nur, Ardhana Januar Mahardhani,
Fachrul Husain Habibie, Andi Hartati, Dina Limbong Pamuttu,
Amruddin, Muh. Akbar, James Sinurat, Dasep Dodi Hidayah,
Dewi Sriastuti Nababan, Zainal Abidin**



PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)

Tim Penulis:

Feliks Arfid Guampe, Umar, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Nur, Ardhana Januar Mahardhani, Fachrul Husain Habibie, Andi Hartati, Dina Limbong Pamuttu, Amruddin, Muh. Akbar, James Sinurat, Dasep Dodi Hidayah, Dewi Sriastuti Nababan, Zainal Abidin.

**Desain Cover:
Fawwaz Abbyan**

**Tata Letak:
Handarini Rohana**

**Editor:
Evi Damayanti**

**ISBN:
978-623-459-236-8**

**Cetakan Pertama:
November, 2022**

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**Copyright © 2022
by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung
All Right Reserved**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG
(Grup CV. Widina Media Utama)**

**Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat**

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telpon (022) 87355370**

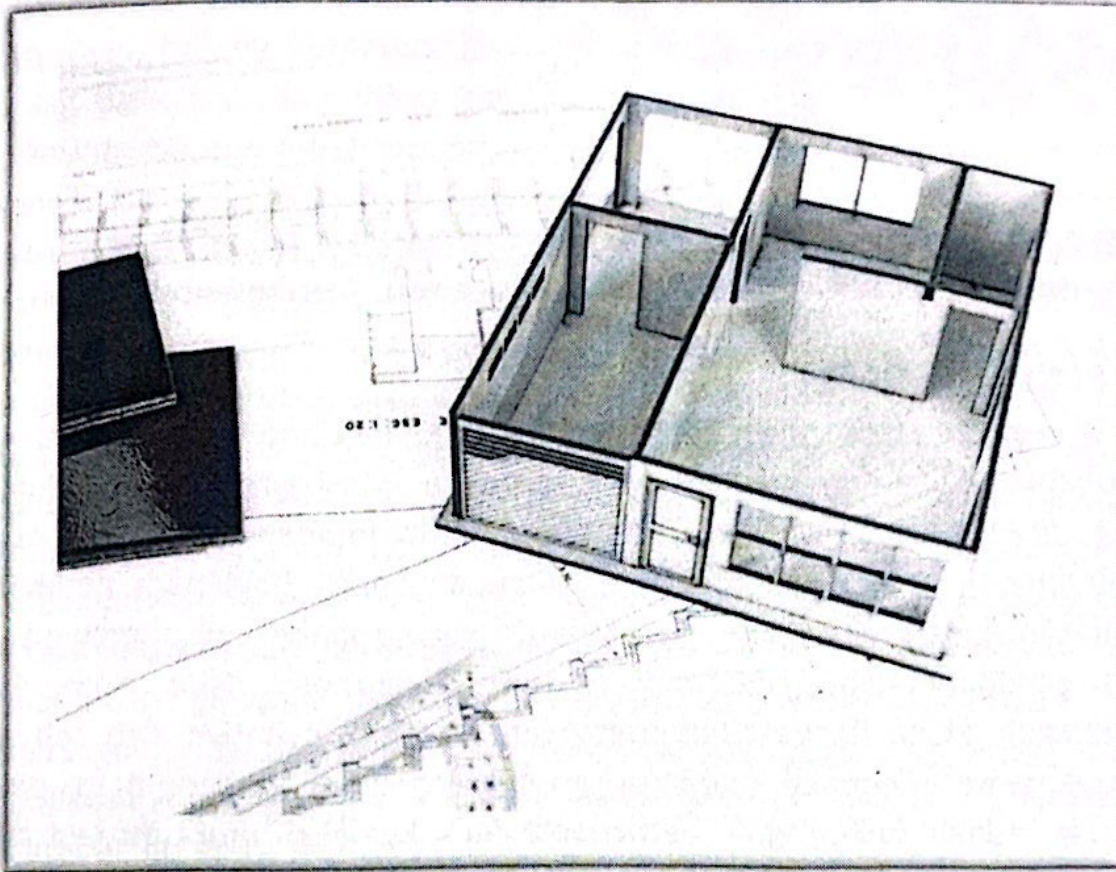
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN URGANSI PEMBANGUNAN PEDESAAN	1
A. Pendahuluan	2
B. Pengertian Pembangunan	3
C. Pembangunan Daerah Pedesaan	5
D. Pentingnya Pembangunan Pedesaan	7
E. Tujuan Pembangunan Pedesaan	12
F. Rangkuman Materi	14
BAB 2 PEREKONOMIAN PEDESAAN INDONESIA	17
A. Pendahuluan	18
B. Kondisi Perekonomian Indonesia	19
C. Kondisi Perekonomian Pedesaan di Indonesia	20
D. Sumber Daya Alam (SDA) Pedesaan	23
E. Sumber Daya Manusia (SDM) Pedesaan Indonesia	25
F. Rangkuman Materi	27
BAB 3 BEBERAPA PARADIGMA PEMBANGUNAN PEDESAAN	31
A. Pendahuluan	32
B. Paradigma Developmentalisme	33
C. Paradigma <i>Rural Development</i>	35
D. Paradigma Pembangunan dan Pembangunan Pedesaan	40
E. Paradigma Pedesaan	43
F. Paradigma Pembangunan Yang Berkelanjutan (<i>Education For Sustainable Development</i>)	45
G. Paradigma <i>People Centered Development</i>	46
H. Paradigma Modernisasi	47
I. Paradigma Baru Tentang Pembangunan Negara Ketiga	51
J. Rangkuman Materi	53
BAB 4 INDIKATOR PEMBANGUNAN PEDESAAN	57
A. Pendahuluan	58
B. Kapasitas Aparatur Desa dan Jangkauan Pelayanan	59
C. Sarana dan Prasarana Perekonomian Desa	60

D. Kekayaan dan Keuangan Desa	61
E. Akses Informasi Memadai	62
F. Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat Desa	62
G. Kesejahteraan Masyarakat	63
H. Pendidikan Masyarakat	64
I. Kesehatan Masyarakat	64
J. Rangkuman Materi	65
BAB 5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	69
A. Pendahuluan	70
B. Kebijakan Pembangunan	70
C. Manajemen Pembangunan	72
D. Kebijakan Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pembangunan Pedesaan	74
E. Kebijakan Pengembangan Wilayah Berbasis Lokalitas	76
F. Rangkuman Materi	78
BAB 6 STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	83
A. Pendahuluan	84
B. Pembangunan Berkelanjutan	86
C. Rangkuman Materi	97
BAB 7 INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	101
A. Pendahuluan	102
B. Instrumen Kebijakan Pembangunan Desa	104
C. Rangkuman Materi	110
BAB 8 PROGRAM PEMBANGUNAN PEDESAAN BERORIENTASI PERTUMBUHAN	113
A. Pendahuluan	114
B. Pembangunan Pedesaan	115
C. Pertumbuhan Ekonomi	117
D. Program Pembangunan Pedesaan Berorientasi Pertumbuhan	126
E. Rangkuman Materi	129
BAB 9 PROGRAM PEMBERANTASAN KEMISKINAN DAN PENANGGUHAN	133
A. Kemiskinan	134
B. Ruang Lingkup Kemiskinan	134

C. Pemberantasan Kemiskinan	137
D. Rangkuman Materi	143
BAB 10 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	
ALAM DAN INFRASTRUKTUR	145
A. Pendahuluan.....	146
B. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) Desa.....	147
C. Infrastruktur	156
D. Program – program Infrastruktur Yang Menunjang Sumber Daya Alam Desa	161
E. Rangkuman Materi	162
BAB 11 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	171
A. Pendahuluan.....	172
B. Penataan Ruang.....	173
C. Penataan Ruang Desa	175
D. Perencanaan.....	177
E. Pembangunan.....	180
F. Perencanaan Pembangunan Pedesaan	182
G. Rangkuman Materi	184
BAB 12 LEMBAGA YANG BERWENANG UNTUK	
PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	189
A. Pendahuluan.....	190
B. Tinjauan Historis Pembangunan Perdesaan.....	191
C. Peran Lembaga Desa Dalam Pembangunan.....	195
D. Perencanaan Pembangunan Perdesaan	197
E. Pelaksanaan Pembangunan Perdesaan.....	198
F. Kelembagaan Desa	200
G. Rangkuman Materi	205
BAB 13 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PEDESAAN	211
A. Pendahuluan.....	212
B. Pembiayaan	213
C. Pembangunan.....	217
D. Rangkuman Materi	227
BAB 14 IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI	
PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	231
A. Pembangunan Pedesaan	232

B. Kebijakan Pembangunan Desa	233
C. Implementasi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa dan Alokasi Desa	235
D. Prioritas Pemanfaatan Dana Desa	238
E. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Desa	241
F. Rangkuman Materi	246
GLOSARIUM	249
PROFIL PENULIS	254



PEMBANGUNAN PEDESAAN

BAB 6: STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ir. Fachrul Husain Habibie, M.M

Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti

BAB 6

STRATEGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. PENDAHULUAN

Di tengah tantangan global seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim dan krisis keuangan, isu pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada integrasi pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan menjadi tantangan serius bagi para pembuat kebijakan di semua negara. Tanpa upaya secara global untuk mengubah pola pembangunan tradisional, eksplorasi sumber daya alam dan lingkungan maka hanya akan meningkat dampak negative dari sebuah pembangunan. Dampak nyata dari produksi melebihi ambang batas daya dukung adalah kekeringan berkepanjangan, kenaikan muka air laut dan kondisi cuaca ekstrim. Salah satu isu utama dalam pembangunan ekonomi adalah bagaimana mengelola keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan pembangunan di satu sisi dan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di sisi lain. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Hal ini karena sumber daya alam dan lingkungan secara inheren terbatas daya dukungnya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak mempertimbangkan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan di masa depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan sebenarnya telah menjadi perhatian para ahli sejak lama. Tetapi istilah keberlanjutan itu sendiri baru berusia beberapa dekade, baru pada tahun 1798 Malthus mulai memperhatikan keberlanjutan. Malthus prihatin dengan ketersediaan lahan di Inggris karena ledakan populasi yang cepat. Satu setengah abad kemudian, setelah Meadow dan rekan-rekannya menerbitkan makalah berjudul *The Limit to Growth* (Meadow et al., 1972) pada tahun 1972, kekhawatiran tentang keberlanjutan ini semakin menguat, dan

pertumbuhan ekonomi semakin tertekan dengan ketersediaan sumber daya alam. Karena ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, arus barang dan jasa yang dihasilkan dari sumber daya alam tidak selalu berkesinambungan (*sustainable*). Meskipun telah banyak dikritik oleh para ekonom karena lemahnya fundamental ekonomi yang digunakan dalam model pertumbuhan marjinal, buku ini cukup membuat orang sadar akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Aspek keberlanjutan ini, yang dikenal sebagai Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (WCED) atau Komisi Brundland, yang pada tahun 1987 menerbitkan buku berjudul Masa Depan Kita Bersama yang menarik banyak perhatian. Publikasi ini kemudian memicu lahirnya agenda baru tentang hubungan antara konsep pembangunan ekonomi dan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Agenda ini juga menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan mereka sendiri. Hal ini menantang gagasan neoklasikisme. Memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang.

Beberapa tahun terakhir, terutama sejak 2007, ketika gelembung di pasar perumahan AS meledak, masyarakat internasional menghadapi krisis ekonomi global yang mengubah beberapa keyakinan sosial dan ekonomi. Mengingat juga kompleksitas teori pembangunan berkelanjutan, dan kompleksitas ekonomi global dan berbagai kepentingan, menjadi jelas bahwa cara berpikir dan bertindak tradisional tidak hanya tidak berkelanjutan tetapi juga merugikan lingkungan, masyarakat dan ekonomi. Oleh karena itu disajikan realitas ekonomi, sosial dan lingkungan baru, yang mendorong masyarakat secara bertahap untuk mengurangi pemborosan dan lebih berkelanjutan, perilaku hijau atau ekologis, yang pada gilirannya mendorong perubahan dalam bisnis dan sosial kegiatan dan persepsi. Dengan berjalannya waktu kebutuhan akan koordinasi bersama dari berbagai strategi menjadi jelas, dan akan menjadi solusi yang tepat, sementara seluruh upaya membutuhkan kerja sama yang komprehensif dan konstruktif.

B. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1. Konsep Pembangunan

Pembangunan, sebagai sebuah konsep, telah dikaitkan dengan beragam makna, interpretasi dan teori dari berbagai ahli. Pembangunan didefinisikan sebagai 'proses evolusioner di mana kapasitas manusia meningkat dalam hal memulai struktur baru, mengatasi masalah, beradaptasi dengan perubahan terus-menerus, dan berjuang dengan sengaja dan kreatif untuk mencapai tujuan baru. Menurut Reyes (2001) pembangunan dipahami sebagai suatu kondisi sosial di dalam sebuah bangsa, di mana kebutuhan penduduknya dipenuhi oleh penggunaan rasional dan berkelanjutan dari sumber daya alam dan sistem. Todaro dan Smith (2006) juga mendefinisikan pembangunan sebagai multi-proses dimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap, dan institusi, serta pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan absolut. Beberapa teori telah dikemukakan untuk menjelaskan konsep pembangunan. Mereka termasuk Modernisasi, Ketergantungan, Sistem Dunia dan Teori Globalisasi. Modernisasi Teori pembangunan membedakan antara dua kategori utama masyarakat: dunia, yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Teorinya, menurut Tipps (1976), berpendapat bahwa masyarakat tradisional terjerat oleh norma, kepercayaan, dan nilai, yang menghambat perkembangan mereka. Oleh karena itu, untuk maju, masyarakat tradisional harus meniru budaya masyarakat modern yang bercirikan akumulasi kapital dan industrialisasi yang sejalan dengan pembangunan.

2. Keberlanjutan

Menurut Basiago 1999 keberlanjutan berarti kapasitas untuk mempertahankan beberapa entitas, hasil, atau proses dari waktu ke waktu. Namun, dalam literatur pembangunan, sebagian besar akademisi, peneliti dan praktisi, menerapkan konsep keberlanjutan yang berkonotasi meningkatkan dan mempertahankan ekonomi, ekologi dan sosial yang sehat dalam sistem pembangunan manusia. Stoddart (2011) mendefinisikan keberlanjutan sebagai efisiensi dan pemerataan distribusi sumber daya intra-generasi dan antar-generasi dengan pengoperasian kegiatan sosial-ekonomi dalam batas-batas ekosistem yang terbatas. Ben-

Eli (2015), di sisi lain melihat keberlanjutan sebagai keseimbangan dinamis dalam proses interaksi antara penduduk dan daya dukung lingkungannya sehingga penduduk berkembang menjadi mengekspresikan potensi penuhnya tanpa menghasilkan efek buruk yang tidak dapat diubah pada daya dukung lingkungan tempat ia bergantung. Dari sudut pandang ini (Thomas, 2015) melanjutkan bahwa keberlanjutan membawa fokus aktivitas manusia dan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tanpa menguras atau menguras sumber daya produktif yang mereka miliki. Hal ini, oleh karena itu, pro-menyuarakan pemikiran tentang cara di mana orang harus menjalani kehidupan ekonomi dan sosial mereka menggambar pada sumber daya ekologi yang tersedia untuk pembangunan manusia.

Mengubah masyarakat, lingkungan dan ekonomi ke yang berkelanjutan adalah salah satu tugas paling berat yang dihadapi manusia saat ini karena harus dilakukan dalam konteks daya dukung yang ada pada daerah atau di setiap negara. Bank Dunia (2017) menjelaskan bahwa keberlanjutan membutuhkan pendekatan inovatif untuk mengelola realitas. Dimana tujuan akhir berkelanjutan adalah untuk memastikan keselarasan dan keseimbangan yang tepat antara masyarakat, ekonomi dan lingkungan dalam hal kapasitas regeneratif ekosistem pendukung kehidupan di planet bumi ini. Berdasarkan hal tersebut maka keselarasan dan keseimbangan dinamis yang harus menjadi fokus definisi keberlanjutan yang bermakna. Pendapat Mensah dan Enu-Kwesi (2018), perlu juga menjadi pertimbangan dalam pengertian berkelanjutan. Dimana mereka berpendapat bahwa definisi berkelanjutan juga harus menekankan pada gagasan kesetaraan lintas generasi yang jelas walaupun menimbulkan sedikit kesulitan karena kebutuhan generasi mendatang tidak mudah untuk didefinisikan atau ditentukan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada saat ini keberlanjutan memprioritaskan dan mengintegrasikan sosial, lingkungan dan eko model ekonomi dalam mengatasi tantangan manusia dengan sangat memperhatikan kemanfaatannya bagi manusia. Model ekonomi berusaha untuk mengumpulkan dan menggunakan modal alam dan dana (keuangan) secara berkelanjutan. Model lingkungan berfokus pada dasar keanekaragaman hayati dan integritas ekologi, dan Model Sosial berusaha

untuk meningkatkan politik, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan yang adil, untuk terus menjamin kesejahteraan manusia. Ketiga model ini digambarkan pada pembangunan berkelanjutan.

3. Sejarah pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro pada tahun 1992. KTT tersebut menandai upaya internasional pertama untuk menyusun rencana aksi dan strategi untuk bergerak menuju pola pembangunan yang lebih berkelanjutan. Konferensi tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 Kepala Negara dan perwakilan dari 178 pemerintah nasional. KTT ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi lain yang mewakili masyarakat sipil. Pembangunan berkelanjutan adalah solusi untuk masalah degradasi lingkungan yang dibahas oleh Komisi Brundtland dalam laporan 1987 dengan tema *Our Common Future*.

Laporan Brundtland bertujuan untuk menyelidiki berbagai kekhawatiran yang telah diangkat dalam beberapa dekade sebelumnya, yaitu, bahwa aktivitas manusia memiliki dampak yang negatif bahkan cukup parah pada planet bumi ini, dan bahwa pola pertumbuhan dan perkembangan tidak akan berkelanjutan jika terus berlanjut. Karya-karya yang menyoroti pemikiran ini termasuk *Silent Spring* karya Rachel Carson (1962), *Tragedy of the Commons* karya Garret Hardin (1968), *Blueprint for Survival* oleh majalah *Ecologist* (1972) dan laporan *Limits to Growth* dari *Club of Rome* (1972).

Konsep pembangunan berkelanjutan menerima pengakuan internasional pertama pada tahun 1972 pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Manusia yang diadakan di Stockholm. Istilah ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun komunitas internasional menyetujui gagasan yang sekarang menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan - bahwa baik pembangunan maupun lingkungan, yang sampai sekarang dianggap sebagai masalah terpisah, dapat dikelola dengan cara yang saling menguntungkan.

Istilah ini dipopulerkan 15 tahun kemudian dalam *Our Common Future*, laporan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan, yang memasukkan apa yang dianggap sebagai definisi pembangunan berkelanjutan yaitu "pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri". Definisi ini merupakan definisi pembangunan berkelanjutan yang dapat diterima oleh masyarakat dunia.

Sampai saat ini para pemimpin besar dunia mengakui pembangunan berkelanjutan sebagai tantangan utama yang masih ada hingga saat ini.

4. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan berarti mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat, untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia di masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini bermakna bahwa pembangunan berkelanjutan mencari pendekatan yang saling mendukung. Oleh karena itu, mencapai pembangunan berkelanjutan memerlukan peningkatan koherensi dan saling melengkapi kebijakan di berbagai sektor, untuk menjawab tantangan pembangunan yang kompleks di masa depan. "*Earth Summit*", yang diadakan di Rio pada tahun 1992, menetapkan pembangunan berkelanjutan sebagai visi panduan untuk upaya pembangunan semua negara. Pemerintah juga berupaya merumuskan dan menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan nasional. Ini dianggap sebagai instrumen yang sangat partisipatif dimana memastikan pembangunan ekonomi yang bertanggung jawab secara sosial sambil melindungi basis sumber daya dan lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang. Komitmen Rio ditegaskan kembali baru-baru ini dalam Deklarasi Milenium PBB. Justice Mensah, 2019 menguraikan bahwa pembangunan adalah proses yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur sosial, dan perilaku agar mengurangi kemiskinan.

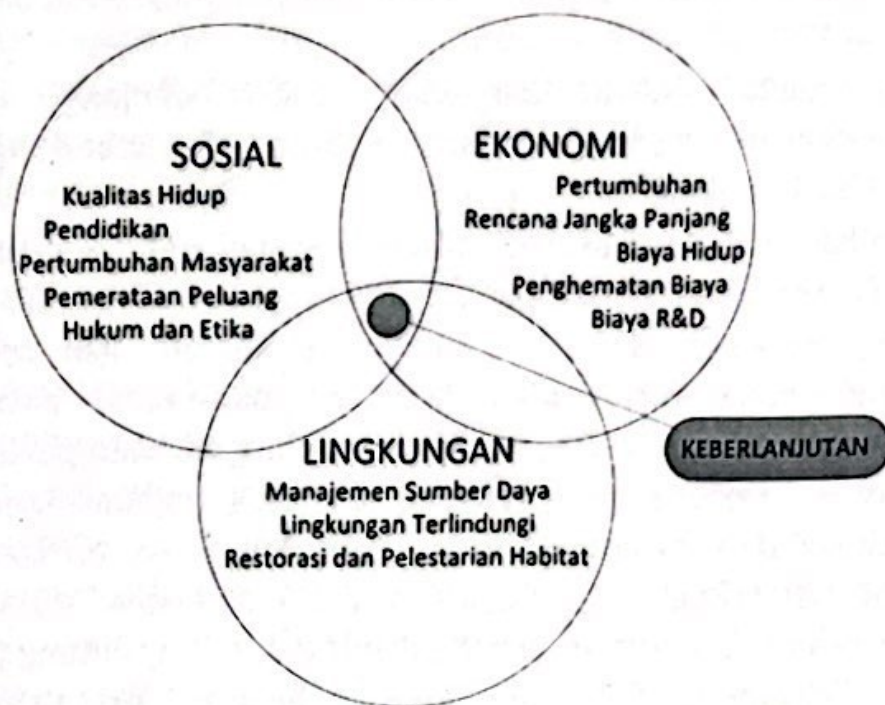
Pada Laporan Brundtland pada tahun 1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (pedesaan, perkotaan, ekonomi, masyarakat, dll) yang memerlukan prinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi

mendatang. Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memulihkan degradasi lingkungan tanpa mengeksposnya. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya fokus pada isu lingkungan. Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga bidang kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dokumen PBB, khususnya hasil KTT Dunia 2005, menyatakan bahwa ketiga dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar yang mendorong pembangunan berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan setiap negara harus memetakan jalannya sendiri, sesuai dengan budaya, sejarah, prioritas sosial dan ekonominya, serta institusi dan struktur politik yang berlaku. Tantangan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai negara, yang mencerminkan faktor geografis, ekologi dan iklim, juga sangat beragam dan diterjemahkan ke dalam kendala, peluang, dan prioritas yang sangat berbeda. Inilah sebabnya mengapa ada banyak interpretasi tentang pembangunan berkelanjutan. Tetapi beberapa tantangan pembangunan berkelanjutan yang kritis bersifat global. Menjaga iklim global atau lapisan ozon, misalnya, membutuhkan kerja sama semua negara dan respons nyata di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan juga menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan bahwa pembangunan memiliki keterbatasan. Menurut organisasi tersebut, keadaan teknologi dan organisasi sosial saat ini yang terkait dengan sumber daya lingkungan, kemampuan biosfer yang terbatas dampak dari aktivitas manusia memberlakukan batasan pada pembangunan berkelanjutan.

5. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Konsep keberlanjutan akan terus mempengaruhi wacana masa depan mengenai pembangunan. Dalam pandangan Porter dan van der Linde (1995), menguraikan bahwa pilihan pembangunan yang terbaik adalah pilihan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah lingkungan dan layak secara ekonomi, adil antara ekonomi dan sosial, dan juga antara sosial lingkungan. Hal ini mengarah pada tiga bidang atau domain keberlanjutan yang saling berhubungan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar Strategi Pembangunan Berkelanjutan – Hubungan antara aspek pembangunan berkelanjutan

Berdasarkan gambar diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua yang dilakukan atau direncanakan oleh manusia dalam pembangunan berkelanjutan memiliki implikasi bagi lingkungan, ekonomi atau masyarakat mengenai keberadaan dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu hubungan gambar diatas harus menjadi dasar Keputusan dan tindakan manusia dalam perencanaan pengembangan berkelanjutan yang tepat akan membawa pertumbuhan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Contohnya keputusan tentang penggunaan lahan, pengelolaan air permukaan, pertanian, desain dan konstruksi bangunan, manajemen energi, pendidikan, dan penegakan hukum.

6. Prinsip-prinsip strategi pembangunan berkelanjutan

Prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pertimbangan dalam merencanakan strategi pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- 1) Dibuat secara nasional. Negara dalam hal ini adalah pemerintah berperan sangat penting dan berinisiatif dalam strategi

pengembangan berkelanjutan secara mandiri yang tidak ada tekanan dari luar.

- 2) Berakar pada visi pembangunan jangka panjang. Visi harus mencerminkan konsensus di antara pemangku kepentingan sosial, ekonomi dan politik.
- 3) Ditetapkan melalui proses partisipatif, yang melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta dan pemangku kepentingan untuk membuka diskusi, mengekspos isu-isu menjadi ditangani, dan membangun konsensus dan dukungan politik pada penetapan rencana strategi.
- 4) Berdasarkan dasar analisis yang kuat, dengan mempertimbangkan juga isu-isu regional yang relevan, termasuk tinjauan komprehensif dari situasi dan prakiraan saat ini, tren dan risiko, termasuk di luar kendali pemerintah atau negara. Analisis semacam itu tergantung pada kredibel dan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi, tekanan dan tanggapan, dan implikasinya terhadap tujuan dan indikator strategi.
- 5) Fokus dan memastikan dampak menguntungkan yang berkelanjutan pada kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan, terutama masyarakat miskin.
- 6) Komprehensif dan terintegrasi. Strategi harus berusaha mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan melalui kebijakan yang saling mendukung. Namun perlu diperhatikan jika integrasi atau kesepakatan tidak dapat dicapai, maka dalam membuat suatu kebijakan para *stakeholder* perlu dijelaskan dan dinegosiasikan secara transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas sangat penting dilakukan.

Dalam mengembangkan prinsip strategi diatas, maka ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian untuk dijalankan yaitu::

- 1) Membangun strategi dan proses yang ada, fokus pada peningkatan konvergensi, saling melengkapi antara kerangka kerja perencanaan atau kebijakan yang berbeda. Hal ini membutuhkan mekanisme untuk berkoordinasi pada proses yang berbeda, dan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi konflik, serta komunikasi yang baik dan penyebaran informasi dengan transparansi dan akuntabilitas.

- 2) Tetapkan target yang realistis dan dapat dipantau terkait dengan prioritas anggaran yang jelas. Target harus menantang – tetapi realistis dalam kaitannya dengan keuangan dan kendala lainnya. Strateginya harus sepenuhnya diintegrasikan ke dalam proses anggaran untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan tersedia untuk menerjemahkannya ke dalam tindakan. Sebaliknya, perumusan anggaran harus mempertimbangkan prioritas yang disorot dalam strategi.
- 3) Mengidentifikasi prioritas kebutuhan pengembangan. Ini meliputi inventarisasi kelembagaan, manusia, keuangan, pasar dan pemangku kepentingan masyarakat sipil dan menemukan cara untuk mengisi kesenjangan.
- 4) Sejak awal melakukan pemantauan peningkatan secara terus menerus. Hal ini membutuhkan mekanisme dan indikator untuk dapat memantau atau menilai kemajuan dari pengembangan berkelanjutan.
- 5) Menentukan peran, tanggung jawab dan hubungan yang berperan dalam proses strategi sejak dini, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta pemangku.
- 6) Mensinkronkan kebijakan tingkat nasional dan daerah atau lokal. Pembuatan kebijakan dan perencanaan harus melibatkan proses dua arah di dalam dan di antara tingkat pemerintahan nasional dan desentralisasi. Prinsip-prinsip strategis utama dan arah harus ditetapkan di tingkat pusat tetapi perencanaan yang rinci, pelaksanaan dan pemantauan akan dilakukan pada tingkat yang terdesentralisasi, dengan dukungan sumber daya dan wewenang yang sesuai.

7. Indikator Pembangunan Berkelanjutan

Dalam menentukan pembangunan berkelanjutan tercapai maka diperlukan indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian apakah pembangunan berkelanjutan sudah tercapai atau belum. *United Nation* pada tahun 2022 mencetuskan pembangunan berkelanjutan melalui 17 tujuan atau indikator sebagai berikut:

1) Tidak Ada Kemiskinan

Indikator pencapaian atau tujuan pengembangan berkelanjutan, diakhirinya kemiskinan dalam semua manifestasinya, termasuk

kemiskinan ekstrem, selama 15 tahun ke depan. Hal ini bermakna bahwa akan tercapai kemakmuran bersama, standar hidup dasar dan manfaat perlindungan sosial bagi orang-orang di mana saja, termasuk yang termiskin dan paling rentan. Untuk memberdayakan masyarakat agar keluar dari kemiskinan, diupayakan memastikan kesetaraan hak dan akses ke sumber daya ekonomi dan alam serta teknologi, properti, dan layanan dasar dan keuangan. Ini juga mendukung masyarakat yang terkena dampak konflik dan bencana terkait iklim dan menekankan komitmen kebijakan dan mobilisasi sumber daya sebagai pendorong yang penting untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Pemantauan indikator ini berfokus pada kemajuan yang dicapai dalam pengentasan kemiskinan multidimensi dan dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar warga negara terpenuhi.

2) Tidak ada kelaparan

Indikator yang kedua, berusaha untuk mengakhiri kelaparan dan kekurangan gizi, dan memastikan akses ke makanan yang aman, bergizi dan cukup. Sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan tangguh merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan ini. Menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu memastikan ketahanan pangan di masa depan dalam skenario peningkatan permintaan dan perubahan iklim.

3) Kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Indikator yang ketiga bertujuan untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk semua dan di segala usia dengan meningkatkan kesehatan reproduksi, ibu dan anak; mengakhiri epidemi penyakit menular; mengurangi penyakit tidak menular dan penyakit jiwa. Indikator ini juga menyerukan pengurangan faktor risiko perilaku dan kesehatan lingkungan.

4) Pendidikan berkualitas

Indikator yang keempat berupaya menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas. Selain kualifikasi formal, pencapaian ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak, dan kewirausahaan.

- 5) Kesetaraan gender
Indikator yang kelima bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dengan mengakhiri segala bentuk diskriminasi, kekerasan, dan segala praktik yang memanfaatkan perempuan dan anak perempuan di ruang publik dan pribadi.
- 6) Air bersih dan sanitasi
Indikator untuk memastikan akses universal terhadap air minum yang aman dan terjangkau, sanitasi dan kebersihan, dan mengakhiri buang air besar sembarangan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas air dan efisiensi penggunaan air serta mendorong abstraksi dan pasokan air tawar yang berkelanjutan.
- 7) Energi yang terjangkau dan bersih
Indikator yang ketujuh menyerukan untuk memastikan akses universal ke layanan energi modern, meningkatkan efisiensi energi dan meningkatkan pangsa energi terbarukan. Untuk mempercepat transisi ke sistem energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, negara perlu memfasilitasi akses ke penelitian energi bersih, mempromosikan investasi dalam infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
- 8) Pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi
Indikator pencapaian yang ke delapan menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tingkat produktivitas ekonomi yang tinggi untuk penciptaan pekerjaan berkualitas dengan gaji yang baik dan pencapaian kemakmuran global. Indikator ini juga mengharapkan penyediaan kesempatan untuk pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua sambil memberantas kerja paksa, perdagangan manusia dan pekerja anak dan mempromosikan hak-hak pekerja dan lingkungan kerja yang aman dan terjamin.
- 9) Industri, inovasi dan infrastruktur
Indikator pencapaian yang kesembilan melihat pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan, yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan manusia. Selain itu, indikator ini juga mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai pendorong utama mengakhiri kemiskinan dan meningkatkan standar hidup semua orang.

10) Mengurangi ketidaksetaraan

Indikator capaian yang kesepuluh menyoroti peningkatan pendapatan 40% terbawah dari populasi dan mengurangi ketidaksetaraan berdasarkan pendapatan, jenis kelamin, usia, kecacatan, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan dengan mengadopsi kebijakan dan undang-undang yang relevan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan regulasi dan pemantauan pasar dan institusi keuangan.

11) Kota dan komunitas yang berkelanjutan

Indikator yang kesebelas bertujuan untuk memperbaiki dan merencanakan kota dan pemukiman manusia lainnya dengan cara yang menawarkan peluang bagi semua, dengan akses ke layanan dasar, energi, perumahan, transportasi, ruang publik hijau, sambil meningkatkan penggunaan sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan.

12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Indikator ke duabelas menyerukan tindakan di semua lini: penerapan praktik berkelanjutan dan pelaporan keberlanjutan oleh para pebisnis; promosi praktik pengadaan yang berkelanjutan dan rasionalisasi subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien oleh pembuat kebijakan; gaya hidup konsumen yang sadar lingkungan; pengembangan teknologi baru dan metode produksi dan konsumsi oleh para peneliti dan ilmuwan dan lain-lain.

13) Iklim

Indikator yang ketiga belas berupaya mengimplementasikan komitmen terhadap Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan mengoperasionalkan Dana Iklim Hijau. Ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kapasitas adaptasi negara terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam dengan mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke dalam strategi, kebijakan, dan perencanaan nasional.

14) Kehidupan di bawah air

Indikator yang ke empat belas bertujuan untuk melestarikan lautan dengan memastikan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Ini termasuk menjaga ekosistem laut dan pesisir, melestarikan setidaknya

10% wilayah pesisir dan laut serta mencegah dan mengurangi pencemaran laut dan dampak pengasaman laut.

15) Kehidupan di darat

Indikator yang ke lima belas berupaya melindungi, memulihkan, dan mempromosikan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, perairan pedalaman, dan pegunungan. Ini termasuk upaya dan sumber daya keuangan untuk mengelola hutan secara berkelanjutan dan menghentikan deforestasi, memerangi penggurunan, memulihkan lahan dan tanah yang terdegradasi, menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan melindungi spesies yang terancam.

16) Perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat

Indikator yang ke enam belas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dan inklusif berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum dan tata pemerintahan yang baik di semua tingkatan. Selain hal tersebut indikator ini juga mengharapkan lembaga yang transparan, efektif dan akuntabel, yang mempromosikan undang-undang dan kebijakan non-diskriminatif, memerangi korupsi, penyuapan dan kejahatan terorganisir dan mencegah kekerasan, terorisme dan kejahatan.

17) Kemitraan

Dan indikator yang ke tujuh belas menyerukan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, non-diskriminatif dan adil di bawah WTO dan penerapan akses pasar bebas bea dan kuota untuk semua negara yang kurang berkembang.

Berdasarkan indikator yang dijelaskan United Nasion pada tahun 2022 tersebut diatas, maka sebagian dapat dijadikan indikator pembangunan desa keberlanjutan di Indonesia, yang mencakup prinsip peningkatan ekonomi, sosial dan budaya, dan pelestarian lingkungan.

C. RANGKUMAN MATERI

Konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dianggap menjadi jawaban atas pembangunan ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekaligus meningkatkan

distribusi pendapatan. Para pemangku kepentingan yang tertarik dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) perusahaan semakin meningkat. Hal yang menjadi fokus mereka ada tiga yaitu *Environmental, Social, dan Governance* (ESG).

Pembangunan berkelanjutan bagi pemerintah dan non-pemerintah merupakan sebagai paradigma pembangunan yang tepat. Ini karena sebagian besar tantangan yang dihadapi umat manusia saat ini adalah seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, kelangkaan air, hilangnya vegetasi, ketidaksetaraan, ketidakamanan, kelaparan, kekurangan dan kemiskinan dapat diatasi dengan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tujuan akhir pembangunan berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial keberlanjutan. Selain itu, keberlanjutan masyarakat dapat tergantung juga pada ketersediaan sistem kesehatan yang tepat, perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, pekerjaan yang layak, kesetaraan gender, pendidikan yang berkualitas dan supremasi hukum. Disisi lainnya keberlanjutan ekonomi, terletak pada adopsi produksi yang tepat, distribusi dan konsumsi sedangkan kelestarian lingkungan didorong oleh fisik lingkungan yang baik melalui perencanaan dan penggunaan lahan serta konservasi ekologi atau keanekaragaman hayati. Oleh karena itu keberlanjutan adalah keadilan antar generasi jangka pendek dan jangka panjang yang implikasinya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan yang akan datang.

Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dan mandiri, melainkan upaya terpadu di berbagai tingkatan, meliputi aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan akan bergantung pada interaksi antara tujuan dan targetnya. Pendekatan menuju keberlanjutan akan membutuhkan realisasi potensi ketiga pilar dimensi secara bersamaan yaitu pilar ekonomi, pilar sosial budaya dan pilar lingkungan. Lebih penting lagi, dalam mengelola pembangunan berkelanjutan, peran kunci harus melibatkan peran pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

TUGAS DAN EVALUASI

1. Uraikan dengan jelas untuk menjawab pertanyaan “mengapa pembangunan berkelanjutan sangat penting bagi keberlanjutan umat manusia di suatu daerah, dan negara bahkan di Dunia.?”
2. Siapa saja yang bertanggung jawab bagi pembangunan berkelanjutan? Jelaskan masing peran dan tanggungjawabnya.
3. Indikator apa saja bagi keberhasilan suatu desa menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Jelaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basiago, A. D. (1999). *Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice: The environmentalist*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Dennis L, Meadow et al., 1972, 1972, *The Limit to Growth and Basic Need*, Potomac Associates Book
- Justice Mensah, 2019, *Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review*
- Mensah, J., & Enu-Kwesi, F. (2018). *Implication of environmental sanitation management in the catchment area of Benya Lagoon, Ghana*. *Journal of Integrative Environmental Sciences*. doi:10.1080/1943815x.2018.1554591
- Reyes, G. E. (2001). *Four main theories of development: modernization, dependency, world-system, and globalization*. *Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*, 4(2), 109–124. University of Pittsburgh, USA.
- Stoddart, H., Schneeberger, K., Dodds, F., Shaw, A., Bottero, M., Cornforth, J., & White, R. (2011). *A pocket guide to sustainable development governance*. Stakeholder Forum 2011.
- Thomas, C. F. (2015). *Naturalizing Sustainability Discourse: Paradigm, Practices, and Pedagogy of Thoreau, Leopold, Carson, and Wilson*
- Tipps, D. (1976). *Modernization theory and the comparative study of societies: A critical perspective* (pp. 65–77). New York: Free Press.
- Todaro, Michael P. & Smith, Stephen C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 9. Jakarta: Erlangga.
- Laporan *United Nations "The Sustainable Development Goals Report 2022"*